

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas pelaporan keuangan ialah salah satu aspek penting dalam dunia bisnis dan akuntansi karena menjadi dasar utamabagi pemerintah, kreditur, investor, ataupun stakeholder lainnya dalam membuat keputusan ekonomi (Khaerryah, 2025). Laporan keuangan yang berkualitas tinggi mencerminkan informasi yang, relevan, dapat dipercaya, sebanding, dan dapat dimengerti, sehingga menyajikan situasi keuangan perusahaan secara transparan dan akurat. Menurut kerangka konseptual *International Financial Reporting Standards* (IFRS), kualitas pelaporan keuangan yang baik ditandai oleh dua karakteristik kualitatif utama, yaitu relevansi (*relevance*), dan representasi tepat (*faithful representation*) (Financial Accounting Foundation, 2010; IFRS Foundation, 2018).

Kualitas pelaporan keuangan dalam praktiknya tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal mencakup *corporate governance*, kompetensi manajemen, serta sistem pengendalian internal yang diterapkan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kualitas audit, regulasi yang berlaku, serta tekanan dari pasar modal dan pemangku kepentingan. Lemahnya salah satu faktor tersebut dapat berdampak pada rendahnya kualitas informasi yang dilaporkan, yang pada akhirnya dapat mengecoh pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Fenomena tersebut tercermin pada kasus PT Indofarma Tbk yang menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pelaporan keuangan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia.

Peristiwa dalam kasus PT Indofarma Tbk bermula dari pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan pendapatan, beban, dan kegiatan investasi perusahaan beserta anak perusahaannya selama periode 2020 hingga Semester I 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan berbagai penyimpangan yang berindikasi tindak pidana dalam pengelolaan keuangan perusahaan dengan nilai indikasi kerugian negara mencapai Rp371.834.530.652. Sejumlah penyimpangan yang ditemukan antara lain memburuknya kualitas aset perusahaan berupa piutang macet sebesar Rp122,93 miliar, persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp23,64 miliar, serta berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan yang mengakibatkan kerugian perusahaan terus meningkat (Agne, 2024). Kondisi tersebut turut berdampak pada penurunan kinerja keuangan Indofarma yang mengalami rugi bersih hingga sekitar Rp3,5 triliun pada tahun 2023, sehingga memperkuat indikasi lemahnya tata kelola perusahaan, pengendalian internal, dan kualitas pelaporan keuangan.

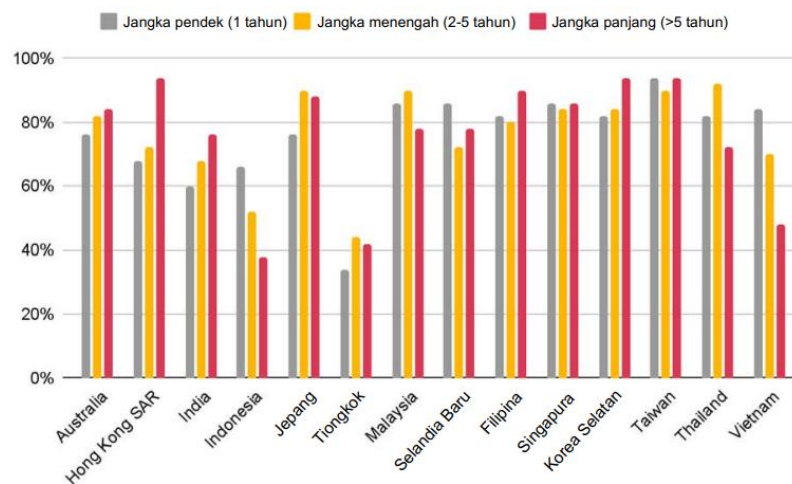
Kasus PT Indofarma Tbk tersebut hanyalah satu dari sekian fenomena yang mendorong pergeseran paradigma dalam cara perusahaan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada para pemangku kepentingan, seiring dengan perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks (Jamaluddin, 2025). Selama bertahun-tahun, laporan keuangan dipandang

sebagai sumber utama informasi dalam menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Namun, berbagai krisis korporasi dan skandal akuntansi menunjukkan bahwa informasi keuangan semata tidak cukup untuk menggambarkan risiko dan keberlanjutan usaha (Nurdin, 2025). Investor, regulator bahkan para pemangku kepentingan mulai menyadari bahwa banyak risiko material perusahaan justru berasal dari aspek non-keuangan yang tidak tercermin secara langsung dalam angka akuntansi. Kondisi ini mendorong evolusi pelaporan korporasi menuju pendekatan yang lebih holistik.

Pelaporan non-keuangan berkembang sebagai unsur pelengkap dari laporan keuangan tradisional. Salah satu bentuk pelaporannya ialah laporan keberlanjutan. Menurut *Global Reporting Initiative* (GRI), laporan keberlanjutan adalah instrumen pelaporan dengan menyajikan secara terbuka data kinerja serta dampak signifikan entitas yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, sebagai hasil dari aktivitas bisnis yang dijalankan perusahaan, baik yang berkontribusi positif maupun negatif terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Global Reporting Initiative, 2020). Melalui laporan keberlanjutan, perusahaan melakukan pengumpulan dan pelaporan data yang mencakup manajemen emisi, kesejahteraan karyawan, serta praktik tata kelola, guna menunjukkan akuntabilitasnya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan global (Fadillah et al., 2023).

Praktik *sustainability reporting* yang terus berkembang turut mendorong peningkatan signifikan dalam perhatian terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di berbagai negara, seperti

Denmark dan Tiongkok, serta negara-negara di kawasan ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina (Firmansyah & IRMAPA, 2022; Madina, 2023). Di tengah kondisi pasar global yang mengalami tekanan akibat ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, kawasan ASEAN justru menunjukkan tren peningkatan investasi berbasis ESG (Prasetyo, 2026). Laporan industri terbaru menunjukkan bahwa aliran dana dan instrumen investasi berbasis ESG di ASEAN mengalami pertumbuhan pada tahun 2025, berbanding terbalik dengan perlambatan investasi berkelanjutan di tingkat global (Prasetyo, 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa investor regional semakin memperhatikan faktor keberlanjutan saat memutuskan sebuah keputusan investasi.



Gambar 1.1 Pengungkapan target ESG dalam kerangka waktu yang berbeda

Sumber: PricewaterhouseCoopers, 2023

Fenomena tersebut semakin diperkuat oleh data pada gambar 1.1 yang menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan di kawasan Asia-Pasifik telah menetapkan target keberlanjutan dalam jangka pendek (1 tahun), menengah (2–5 tahun), maupun jangka panjang (>5 tahun), dengan negara-negara seperti

Singapura, Malaysia, Filipina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang mencatat persentase pengungkapan yang tinggi, bahkan untuk target jangka panjang mendekati atau melebihi 90%. Kondisi ini menegaskan bahwa penetapan target ESG menjadi instrumen strategis yang penting bagi perusahaan untuk memantau kemajuan dalam merespons isu-isu keberlanjutan yang material serta menyesuaikan strategi apabila diperlukan tindakan korektif. Kecenderungan ini mengidentifikasi bahwa komitmen terhadap ESG tidak hanya bersifat sukarela, tetapi juga dipengaruhi oleh dorongan regulasi yang semakin kuat di berbagai negara.

Dorongan regulasi tersebut secara konkret terwujud dalam berbagai kebijakan yang diterapkan negara-negara di kawasan ASEAN. Negara Singapura, melalui *Singapore Exchange* (SGX), mewajibkan seluruh emiten untuk menyusun dan mengungkapkan laporan ESG sejak tahun 2016 dengan mengacu pada standar *Global Reporting Initiative* (GRI) serta disertai rencana perbaikan berkelanjutan (Singapore Exchange, 2025). Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi ESG, pemerintah Singapura juga memberikan insentif bagi perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain berupa subsidi audit keberlanjutan dan fasilitas kredit pajak (Siagian et al., 2025). Kebijakan serupa juga diterapkan di Indonesia, dimana pemerintah telah mewajibkan penyusunan laporan keberlanjutan yang berisikan pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sejak tahun 2019 bagi lembaga keuangan dan perusahaan terbuka dan perusahaan tercatat sejak tahun 2020 sebagai wujud komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

kedalam kebijakan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Mubarok & Widianingsih, 2025). Namun, dalam implementasinya kewajiban pelaporan keberlanjutan bagi seluruh kategori emiten di Indonesia mengalami penundaan bertahap hingga tahun 2021 (PwC, 2023).

Komitmen kuat berbagai negara di kawasan ASEAN, termasuk Singapura dan Indonesia, dalam mendorong pengungkapan ESG melalui kerangka regulasi yang semakin ketat belum serta-merta menjamin bahwa praktik pelaporan perusahaan telah mencerminkan kondisi keuangan dan tata kelola yang sesungguhnya. Regulasi yang mewajibkan penyusunan laporan keberlanjutan memang berhasil mendorong peningkatan volume pengungkapan ESG secara signifikan, namun di sisi lain juga membuka celah bagi perusahaan untuk memanfaatkan pengungkapan tersebut sebagai instrumen pembentukan citra semata, alih-alih sebagai refleksi nyata dari kualitas pengelolaan bisnis dan integritas pelaporan keuangan mereka (Gafni et al., 2024). Hal ini memperkuat fenomena yang telah diilustrasikan sebelumnya melalui kasus PT Indofarma Tbk, yang menyatakan bahwa lemahnya tata kelola internal dan integritas pelaporan tidak otomatis terkoreksi hanya dengan meningkatnya volume pengungkapan non-keuangan. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi ketegangan antara ekspansi pengungkapan ESG di satu sisi dan kualitas pelaporan keuangan yang substantif di sisi lain, yang menjadi isu empiris penting untuk dikaji lebih mendalam.

Fenomena tersebut mendorong munculnya pertanyaan mendasar mengenai bagaimana sesungguhnya hubungan antara pengungkapan ESG dengan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Dalam literatur akuntansi, kualitas pelaporan keuangan sering diukur melalui kualitas laba (*earnings quality*), yakni sejauh mana laba yang dilaporkan mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan yang sebenarnya, bebas dari manipulasi akrual maupun rekayasa transaksi (Robinson et al., 2020). Perusahaan dengan kualitas laba yang tinggi cenderung menyajikan informasi keuangan yang lebih andal, relevan, dan dapat diperbandingkan, sehingga memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan.

Hubungan antara pengungkapan ESG dan kualitas pelaporan keuangan secara teoritis dapat dijelaskan menggunakan dua kerangka teori yang saling melengkapi. Teori pertama yaitu *agency theory*, dimana pengungkapan ESG dipandang sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) (Hendrastuti & Harahap, 2023). Selain itu, transparansi pengungkapan ESG yang lebih tinggi diharapkan dapat menekan ruang lingkup tindakan manajemen dalam memanipulasi laba demi kepentingan pribadi, karena pengungkapan yang lebih komprehensif meningkatkan pengawasan dan mengurangi oportunisme manajerial (Akin & Akin, 2026). Namun, teori ini juga membuka kemungkinan sebaliknya, yakni manajemen justru memanfaatkan pengungkapan ESG yang ekstensif sebagai dalih untuk mengalihkan perhatian pemangku kepentingan dari praktik manajemen laba yang dilakukan secara bersamaan.

Kerangka teori kedua yang relevan adalah *institutional theory*, khususnya melalui perspektif isomorfisme institusional yang menekankan bahwa perusahaan tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan efisiensi internal, melainkan juga oleh tekanan institusional dari regulator, investor, dan norma industri untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, sebagai proses yang membantu mereka memperoleh legitimasi dan mempertahankan keberlangsungan jangka panjang (Elmanaseer & Gerged, 2025). Tekanan tersebut beroperasi melalui tiga mekanisme, yakni koersif yang bersumber dari regulasi pemerintah, mimetik yang mendorong perusahaan meniru praktik ESG perusahaan lain yang dianggap berhasil, serta normatif yang muncul dari ekspektasi profesional dan sosial di lingkungan industri (Elmanaseer & Gerged, 2025). Dalam konteks ini, pengungkapan ESG berpotensi bersifat simbolik dan seremonial, sehingga belum tentu diikuti oleh peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang substantif. Ketegangan antara kedua perspektif inilah yang menjadikan hubungan ESG dan kualitas laba sebagai isu yang masih diperdebatkan dan relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Sejumlah penelitian empiris telah berupaya mengkaji hubungan antara pengungkapan ESG dan kualitas pelaporan keuangan dengan hasil yang beragam dan belum konklusif. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Özer et al., (2024) dimana perusahaan dengan skor ESG yang lebih tinggi menunjukkan kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik, dengan *financial distress* sebagai mekanisme mediasi yang signifikan. Selaras dengan itu, Gafni et al., (2024) yang meneliti perusahaan publik Amerika Serikat periode 2012–

2022 menemukan bahwa tingginya peringkat ESG justru beriringan dengan kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik, bahkan regulasi *mandatory ESG disclosure* yang semakin ketat terbukti mendorong peningkatan kualitas pelaporan keuangan secara keseluruhan.

Penelitian Krueger et al., (2024) pun memperkuat hasil ini dengan membuktikan bahwa kewajiban pengungkapan ESG di berbagai negara secara signifikan meningkatkan likuiditas saham dan memperbaiki lingkungan informasi perusahaan, terutama bagi perusahaan dengan lingkungan informasi yang lemah. Di sisi lain, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Luo et al., (2024) yang mengatakan bahwa hubungan positif ESG terhadap kinerja keuangan tidak bersifat seragam, melainkan dimoderasi secara kuat oleh kualitas tata kelola negara, khususnya stabilitas politik, kualitas regulasi, dan pengendalian korupsi. Hasil ini mengisyaratkan bahwa efektivitas ESG dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sangat bergantung pada konteks institusional di mana perusahaan beroperasi.

Berdasarkan pertimbangan secara keseluruhan, penelitian ini memilih tiga negara di kawasan ASEAN sebagai objek kajian, yakni Singapura, Indonesia, dan Vietnam. Pemilihan ketiga negara ini didasarkan pada pertimbangan teoritis dan empiris yang kuat yaitu sebagai perwakilan dari masing-masing kelompok pendapatan (*income group*) yang berbeda berdasarkan klasifikasi World Bank. Berdasarkan klasifikasinya, Singapura termasuk dalam kelompok *high-income economy*, Indonesia masuk dalam kategori *upper-middle-income economy*, sementara Vietnam diklasifikasikan

sebagai *lower-middle-income economy* (World Bank, 2025). Perbedaan karakteristik ekonomi tersebut mencerminkan variasi tingkat kematangan pasar modal, kualitas tata kelola perusahaan, kapasitas penerapan praktik ESG, serta kesiapan perusahaan dalam menyusun pelaporan keberlanjutan.

Selain itu, tiga negara ini juga menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal kualitas tata kelola, yang secara konkret tercermin salah satunya dalam dimensi *control of corruption*, yang merupakan salah satu dari enam dimensi *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang dikeluarkan World Bank (World Bank, 2024). Menurut *Corruption Perception Index* (CPI), Singapura mencatatkan skor tertinggi di kawasan ASEAN dengan nilai 84 dari 100, mempertahankan posisinya sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Vietnam berada pada posisi menengah dengan skor 40, sementara Indonesia mencatatkan skor 37, yang menempatkannya di posisi yang relatif lemah dalam pengendalian korupsi di antara negara-negara ASEAN (Lubis, 2025). Perbedaan dalam *control of corruption* di antara Singapura, Indonesia, dan Vietnam ini menjadikan ketiganya sebagai konteks empiris yang ideal untuk menguji hipotesis bahwa kualitas tata kelola tingkat negara memoderasi hubungan antara pengungkapan ESG dan kualitas pelaporan keuangan.

Pemilihan *control of corruption* sebagai proksi *country-level governance* dalam penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa dimensi ini paling langsung relevan dengan kualitas pelaporan keuangan. Dalam lingkungan dengan tingkat korupsi yang tinggi, pengawasan terhadap praktik manajemen dan keandalan informasi akuntansi cenderung lemah, sehingga

pengungkapan ESG yang dilakukan perusahaan lebih rentan bersifat simbolik dan menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas pelaporan keuangan (Thi et al., 2025). Sebaliknya, di negara dengan pengendalian korupsi yang kuat seperti Singapura, pengungkapan ESG yang komprehensif lebih berpeluang dibarengi oleh pengawasan ketat yang mendorong perusahaan untuk benar-benar meningkatkan integritas dan kualitas laporan keuangannya. Dengan demikian, *control of corruption* menjadi mekanisme institusional yang relevan untuk menjelaskan mengapa dampak pengungkapan ESG terhadap kualitas pelaporan keuangan tidak bersifat seragam di semua konteks negara.

Pemilihan periode observasi dalam penelitian ini didasarkan pada argumen yang kuat dari sisi regulasi, momentum institusional, dan ketersediaan data. Penelitian ini menetapkan periode pengamatan tahun 2021 hingga 2024 dengan justifikasi utama yang saling memperkuat. Penetapan tahun 2021 sebagai tahun awal pengamatan karena periode ini menunjukkan konsistensi dan ketersediaan data yang lebih luas, serta terjadi peningkatan implementasi dan penguatan regulasi terkait pengungkapan ESG di negara Singapura, Indonesia, dan Vietnam. Di Singapura, SGX dalam *Sustainability Reporting Rules* mewajibkan seluruh emiten mengintegrasikan *climate-related disclosures* berbasis rekomendasi TCFD ke dalam *sustainability report* mereka. Di Indonesia, berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017, emiten berskala besar diwajibkan menyampaikan *sustainability report* pertama mereka paling lambat 30 April 2021, yang diperkuat dengan penerbitan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 sebagai panduan teknis pengungkapan ESG yang lebih

rinci dan mengikat secara hukum. Di Vietnam, Circular No. 96/2020/TT-BTC yang diterbitkan kementerian keuangan Vietnam mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2021 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017; Singapore Exchange, 2025; VietNam Governance, 2020).

Pemilihan tahun 2024 sebagai batas akhir karena merepresentasikan periode di mana tekanan adopsi standar ESG global semakin intensif, seiring dengan mulai diresponsnya IFRS S1 dan IFRS S2 yang diterbitkan ISSB pada tahun 2023 oleh regulator dan pelaku pasar di kawasan ASEAN, meskipun tingkat adopsi formalnya masih bervariasi antar negara (IFRS Foundation, 2023). Secara keseluruhan, rentang 2021–2024 dipilih karena mewakili periode dengan dinamika regulasi, tekanan institusional, dan heterogenitas lingkungan tata kelola yang paling intens di kawasan ASEAN, sehingga memberikan kondisi yang ideal untuk menguji peran moderasi *control of corruption* dalam hubungan antara pengungkapan ESG dan kualitas pelaporan keuangan.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan, terdapat *research gap* yang signifikan dan layak untuk dikaji secara empiris, sehingga peneliti menyusun penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengungkapan *Environmental, Social, And Governance* (ESG) Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Dengan *Country-Level Governance* Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Apakah pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan?
2. Apakah *country-level governance* memoderasi hubungan *pengungkapan Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap kualitas pelaporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh dan menganalisis pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap kualitas pelaporan keuangan.
2. Untuk menguji pengaruh dan menganalisis hubungan *country-level governance* yang memoderasi *pengungkapan Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap kualitas pelaporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literatur akuntansi dan keuangan, khususnya terkait pelaporan keberlanjutan dan kualitas pelaporan keuangan. Studi ini memperkaya bukti empiris

mengenai keterkaitan antara pengungkapan ESG dan kualitas pelaporan keuangan dengan mengintegrasikan perspektif *Institutional Theory* dan *Agency Theory*. Selain itu, penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis melalui penggunaan *control of corruption* sebagai variabel moderasi yang merepresentasikan kualitas tata kelola negara, sehingga memperluas pemahaman mengenai peran lingkungan institusional dalam konteks lintas negara.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, pengamatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak pemangku kepentingan, yaitu

1. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi empiris untuk pengembangan kajian akuntansi keuangan dan pelaporan keberlanjutan, khususnya terkait integrasi teori keagenan dan teori institusional untuk menjelaskan hubungan antara pengungkapan ESG dan kualitas pelaporan keuangan. Temuan pengamatan ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut guna mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan faktor tata kelola negara atau indikator kelembagaan lainnya dalam konteks lintas negara.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini harapannya dapat digunakan sebagai bahan ajar maupun studi kasus dalam mata kuliah akuntansi

keuangan, pelaporan keberlanjutan, dan tata kelola perusahaan. Mengintegrasikan topik ESG dan kualitas pelaporan keuangan dalam kurikulum diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta relevansi faktor institusional dalam praktik pelaporan modern, sehingga menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap perkembangan standar pelaporan global.

3. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan memberikan implikasi penting mengenai urgensi penguatan kualitas tata kelola negara, khususnya dalam aspek pengendalian korupsi dan efektivitas regulasi, guna memastikan bahwa pengungkapan ESG benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan tidak sekadar menjadi kepatuhan simbolis. Temuan ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijakan pelaporan keberlanjutan yang lebih tegas dan terstandarisasi.